

**PRODUK
DOMESTIK
REGIONAL
BRUTO
JAWA BARAT
1979-1983**

**MENURUT
PENGUNAAN**

KANTOR STATISTIK  PROVINSI JAWA BARAT

BANDUNG, SEPTEMBER 1985

32530.8505

**PRODUK
DOMESTIK
REGIONAL
BRUTO
JAWA BARAT
1979-1983**

**MENURUT
PENGUNAAN**

KANTOR STATISTIK  PROVINSI JAWA BARAT

BANDUNG, SEPTEMBER 1985

KATA PENGANTAR

Publikasi hasil penghitungan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat Tahun 1979 - 1983 dari sudut Penggunaan merupakan Publikasi yang ketiga setelah Publikasi Tahun 1977 - 1981 (yang merupakan Study). Angka Publikasi Tahun 1979 - 1983 merupakan angka perbaikan dari angka Publikasi sebelumnya, hal ini disebabkan data yang masih kurang lengkap pada tahun sebelumnya.

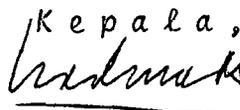
Tabel-tabel yang disajikan dalam Publikasi ini selain memuat Tabel-tabel Pokok, juga Tabel-tabel tambahan serta konsep dan definisi, metode penghitungan maupun cara pengumpulan dan sumber datanya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa hasil penghitungan ini masih kurang sempurna, dengan harapan semoga untuk masa-masa mendatang penghitungan angka Publikasi ini lebih sempurna lagi. Mudah-mudahan data yang disajikan dalam Publikasi ini dapat digunakan sebagai pembanding terhadap angka PDRB yang dihitung berdasarkan pendekatan produksi.

Kepada semua pihak yang telah membantu sehingga dapat diselesaikannya Publikasi ini, kami mengucapkan terima kasih dan tidak lupa pula kami harapkan saran-sarannya agar Publikasi berikutnya lebih baik lagi.

Bandung, 14 September 1985.

KANTOR STATISTIK PROVINSI JAWA BARAT

K e p a l a ,


Hadma Ali Suardi, B.St.
NIP. . 340000442

D A F T A R I S I

	<u>Halaman</u>
Kata Pengantar	-
D a f t a r I s i	1
D a f t a r T a b e l	11
I. P e n d a h u l u a n	1
II. Kegunaan dari PDRB menurut Penggunaannya	2
III. Metode Penghitungan	2
3.1. Konsumsi Rumah Tangga	3
3.2. Konsumsi Lembaga yang tidak mencari Untung	5
3.3. Konsumsi Pemerintah	6
3.4. Pembentukan Modal Bruto	7
3.5. Ekspor dan Impor	8
IV. Tabel-Tabel Pokok	14

D A F T A R T A B E L

- TABEL 1 : Penggunaan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Barat 1979 - 1983.
- TABEL 2 : Penggunaan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan'75 Provinsi Jawa Barat 1979 - 1983.
- TABEL 3 : Laju Pertumbuhan Penggunaan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Barat 1979 - 1983.
- TABEL 4 : Laju Pertumbuhan Penggunaan PDRB Atas Dasar Harga Konstan'75 Provinsi Jawa Barat 1979 - 1983.
- TABEL 5 : Distribusi Persentase Penggunaan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Barat 1979 - 1983.
- TABEL 6 : Distribusi Persentase Penggunaan PDRB Atas Dasar Harga Konstan'75 Provinsi Jawa Barat 1979 - 1983.
- TABEL 7 : Indeks Implisit Penggunaan PDRB Provinsi Jawa Barat 1979 - 1983.

I. P E N D A H U L U A N

Metode penghitungan Pendapatan Regional dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu :

1. Metode Pendekatan Produksi
2. Metode Pendekatan Pengeluaran
3. Metode Pendekatan Pendapatan.

Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan, Usaha/SeKToral yang disajikan tiap tahun. Metode Penghitungan/Sebagian besar menggunakan pendekatan Produksi. nya

Dengan Metode pendekatan produksi ini PDRB yang disajikan secara sektoral dapat memperlihatkan peranan perekonomian secara sektoral dan bila dikaitkan dengan jumlah tenaga kerja pada masing-masing sektor akan menunjukkan besarnya produktivitas secara sektoral maupun menyeluruh suatu daerah. Produk Domestik Regional Bruto menurut penggunaan merupakan Penghitungan PDRB yang menggunakan Metode Pendekatan Pengeluaran. Penyajian PDRB menurut penggunaan dapat memperlihatkan komposisi penggunaan barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah sendiri maupun yang berasal dari wilayah lain.

Pada garis besarnya penggunaan dari Barang dan Jasa yang dihasilkan dalam suatu kegiatan Ekonomi terbagi atas :

1. Barang dan Jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka Proses Produksi.
2. Barang dan Jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat yang disebut sebagai konsumsi akhir.

Konsumsi akhir meliputi komponen-komponen :

1. Pengeluaran konsumsi Rumah tangga.
2. Pengeluaran konsumsi Lembaga swasta yang tidak mencari untung.
3. Pengeluaran konsumsi Pemerintah.
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto.
5. Perubahan stok dari bahan mentah, barang jadi dan setengah jadi.
6. Ekspor dan Impor.

II. KEGUNAAN

II. PEGUNAAN DARI PDRB MENURUT PINGGUNAANNYA

1. Sebagai Indikator Ekonomi Makro.

PDRB menurut penggunaannya dapat dipakai untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah dengan cara mengamati data empirisnya.

Di negara-negara yang pendapatannya rendah menunjukkan bahwa Persentase dari Pendapatan yang digunakan untuk konsumsi cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju.

Sedangkan untuk komponen Pembentukan modal terjadi sebaliknya.

Komponen Ekspor-Import untuk suatu Wilayah dapat memberikan gambaran akan ketergantungan terhadap wilayah lain dalam bidang perekonomiannya.

Bila Komponen pembentukan modal dihubungkan dengan PDRB dapat dihitung ICOR nya yang dapat mencerminkan sampai berapa lama suatu modal yang dibentuk di daerah tersebut dapat diakumulir dari Output yang dihasilkannya.

Makin besar nilai ICOR-nya menunjukkan makin lambatnya akumulasi modal dari Output di daerah tersebut.

2. Sebagai Indikator Ekonomi Mikro.

Dari komponen konsumsi Rumah tangga dapat dianalisa elastisitas permintaan terhadap suatu barang konsumsi dengan adanya peningkatan Pendapatan penduduk sehingga dapat diestimasi permintaan barang disaat-saat mendatang.

Tentu saja analisa ini tak lepas dari analisa hasil Survei NAS, SBH dan Survei-Survei Konsumsi sejenisnya.

III. METODE PENGHITUNGAN.

Komponen-komponen PDRB menurut penggunaan dapat dituliskan dalam bentuk persamaan sbb..

$$Y + M = C + I_F + I_S + E$$

Karena penghitungan PDRB menurut penggunaan hanya mencakup Produk Domestik maka pers diatas dapat disederhanakan sbb.

$$\begin{aligned} Y &= C + I_F + I_S + E \\ &= C + (I_F + I_S) + E \\ &= C + I + (E) \end{aligned}$$

Dimana

Dimana.

Y = Produk Domestik Regional Bruto

C = Konsumsi

I = Investasi

E M = Ekspor Netto

Sehubungan data yang tersedia belum sepenuhnya lengkap maka dalam menghitung komponen-komponen tersebut dilakukan estimasi-estimasi sebagai berikut .

1. Konsumsi Rumah Tangga.

Konsumsi Rumah tangga adalah pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa baik untuk barang baru tahan lama maupun tidak, setelah diperhitungkan hasil penjualan barang bekas atau barang-barang yang tidak dipergunakan lagi.

Pembuatan/Pembelian rumah baru atau perbaikan besar-besaran sehingga merubah nilai maupun bentuk rumah tidak termasuk dalam konsumsi rumah tangga.

Barang dan Jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dikelompokkan sebagai berikut .

1. Makanan, Minuman dan Tembakau/Rokok.
2. Pakaian, alas kaki dan Tutup kepala.
3. Langganan Listrik, Air, Gas dan bahan bakar untuk rumah tangga.
4. Mebelair dan peralatan rumah tangga.
5. Pengobatan dan biaya pemeliharaan kesehatan.
6. Biaya Transport dan Komunikasi.
7. Rekreasi, Hiburan, Pendidikan dan Kesehatan.
8. Macam-macam barang dan jasa.

Penilaian pengeluaran Konsumsi Rumah tangga didasarkan pada harga pembeliannya termasuk biaya pengangkutan dan instalasinya tetapi tidak termasuk pembayaran bunga apabila barang tersebut dibayar secara cicilan.

Ada dua konsep yang dianjurkan dalam penghitungan Konsumsi rumah tangga yaitu

- 1). Pengeluaran konsumsi didalam wilayah suatu daerah tanpa memperhatikan siapa yang melakukannya (Konsep Konsumsi Domestik).
- ii) Pengeluaran konsumsi oleh Penduduk suatu daerah tanpa memperhatikan dimana dilakukannya (Konsep Konsumsi-Penduduk).

Kalau kita perhatikan definisi SUSENAS yaitu Sumber data yang paling penting untuk menaksir konsumsi rumah tangganya, maka kita cenderung untuk mengikuti konsep yang kedua, yaitu Konsep Konsumsi Penduduk, yang tidak memperhatikan dimana konsumsi dilakukan oleh penduduk tersebut.

Sumber data yang dipergunakan untuk menghitung besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah hasil Survei Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga yang dilaksanakan melalui SUSENAS oleh Biro Pusat Statistik.

Untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga Provinsi Jawa Barat - dipergunakan hasil pengolahan SUSENAS Tahun 1978, 1979 dan 1981. Sedangkan untuk Tahun 1980, 1982 dan 1983 dilakukan estimasi berdasarkan kepada hasil SUSENAS Tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut .

1. Dengan Assumsi bahwa kenaikan Konsumsi adalah fungsi dari kenaikan penduduk dan elastisitas permintaan karena adanya kenaikan pendapatan, maka perkiraan rata-rata konsumsi per kapita per tahun untuk tahun-tahun lainnya dapat dihitung.

$$C_1^t = C_1^0 (1 + \Delta C) \text{ dimana } \Delta e = b_1 \times \Delta y$$

Jadi perkiraan rata-rata konsumsi per kapita per tahun untuk tahun t .

$$C_1^t = C_1^0 (1 + b_1 \Delta y)$$

Perkiraan Total pengeluaran konsumsi per tahun untuk tahun t .

$$C^t = N^t \times \sum_{i=1}^n C_i^t$$

Dimana . C_1^t = Rata-rata pengeluaran Konsumsi per Kapita untuk jenis barang 1 pada tahun t .

C_i^0 = Rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita untuk jenis barang 1 pada tahun dasar.

b_1 - Elastisitas permintaan terhadap barang 1.

Δy = Kenaikan pendapatan per kapita (PDRB per kapita).

C^t = Perkiraan Total konsumsi pada tahun t .

N^t = Jumlah Penduduk Pertengahan tahun t .

2. Untuk mendapatkan perkiraan Total konsumsi atas Dasar harga yang Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 1975, maka digunakan.

Elastisitas dihitung dengan mencari koefisien arah dari persamaan exponential yang menyatakan hubungan antara - kenaikan, Konsumsi (Kuantum) dengan kenaikan pendapatan.

Penghitungan ini didasarkan atas Cross Sectional analysis dari SUSENAS dengan hypothesis "semakin tinggi pendapatan seseorang" semakin tinggi ia mengkonsumsi suatu jenis barang".

Karena data pendapatan per Kapita hasil SUSENAS 1976 belum tersedia secara lengkap, maka jumlah pendapatan dalam analisa ini, dianggap sama dengan jumlah pengeluaran.

Persamaan regresi yang dipakai untuk menghitung elastisitas suatu barang adalah pers exponential yang dirumuskan - sebagai berikut :

$$Z = ay^b$$

Dimana Z = konsumsi
 y = Pendapatan
 b = Elastisitas Konsumsi (Kuantum)
Karena Kenaikan Pendapatan.

Karena $y = c$
 $z = ac^b$

Untuk memudahkan penghitungan pers exponential diatas dapat dirubah menjadi persamaan logaritma sebagai berikut

$$\text{Log } Z = \text{Log } a + b \text{ log } c.$$

2. Konsumsi Lembaga yang tidak mencari untung (LTNU)

Pengeluaran Konsumsi Lembaga tidak mencari untung sama - dengan biaya pengeluaran Lembaga-lembaga tersebut tanpa memperhatikan dari mana sumber biayanya kecuali yang jelas diperoleh dari subsidi Pemerintah.

Pengeluaran Lembaga ini meliputi pembelian dan penerimaan transfer dalam bentuk natura dari barang dan jasa, pembayaran upah dan gaji, penyusutan dan pajak tak langsung netto yang dibayar lembaga tersebut dikurangi penjualan barang dan jasa yang dihasilkan.

Lembaga Swasta yang tidak mencari untung adalah Lembaga/Badan Swasta yang memberikan pelayanan atau jasa kepada masyarakat seperti : Organisasi Serikat Buruh, Persatuan para ahli, Organisasi Politik, Lembaga Pendidikan, Kesehatan dan Organisasi kesejahteraan Masyarakat yang khusus melayani masyarakat - dan tidak mementingkan keuntungan.

Cara yang dilakukan untuk mengestimasi pengeluaran Konsumsi - hanyalah dengan menaksir Out Put Sektor Jasa-Jasa Sosial.

Konsumsi Pemerintah.

Besarnya Konsumsi Pemerintah sama dengan besarnya pengeluaran Pemerintah yang terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pengeluaran Pemerintah Terdiri dari :

1. Pengeluaran Pemerintah untuk membayar upah & gaji Pegawai sebagai balas jasa yang diberikan dan selanjutnya disebut belanja pegawai, dimana pegawai disini mencakup pegawai Pemerintah Pusat dan Pegawai Pemerintah daerah baik Sipil maupun Militer.
2. Pengeluaran Pemerintah untuk pembelian barang dan jasa yang habis dipakai dalam proses produksi yang selanjutnya disebut belanja barang.
Juga termasuk dalam belanja barang disini seperti belanja perjalanan dinas pegawai, biaya perbaikan kendaraan dinas, Perbaikan Kantor Rumah Dinas dan pengeluaran Rutin lainnya.

Konsumsi Pemerintah di Provinsi Jawa Barat dihitung berdasarkan data pengeluaran Rutine dari Pemerintah Pusat di Jawa-Barat dan Pemerintah Daerah Tk.I, Pemerintah Daerah Tk.II - dan Pemerintah Desa ditambah dengan perkiraan prosentase tertentu dari pengeluaran pembangunan yang bukan merupakan pembentukan modal baik dari pemerintah pusat di Jawa Barat maupun pemerintah daerah.

Data pengeluaran pembangunan Pusat di Jawa Barat diperoleh dari review dan analisa pelaksanaan proyek Sektorál APBN, BAPPEDA Tk.I Jawa Barat.

Sedangkan pengeluaran Rutine Pemerintah Pusat didapat dari alokasi pengeluaran Rutine Pemerintah Pusat dengan perbandingan Pegawai Negeri Sipil Pusat di Jawa Barat terhadap Total Indonesia sebagai alokatornya.

Pembentukan Modal Bruto

Pada dasarnya Pembentukan Modal Terdiri dari

1. Pembentukan Modal Tetap (fixed capital formation).
2. Perubahan Stock (increase in Stock).

Pembentukan Modal Bruto dalam suatu region adalah semua barang Modal baru yang digunakan/dipakai sebagai alat untuk berproduksi di region tersebut.

Untuk lebih jelasnya apa yang harus dicakup sebagai barang Modal, maka kriteria-kriterianya sebagai berikut .

1. Barang tersebut harus termasuk barang Tahan lama minimal dapat digunakan dalam waktu lebih setahun.
2. Perbaikan-perbaikan barang modal yang cukup besar yang sekiranya akan menambah umur barang modal tersebut.
3. Perbaikan mutu tanah, perluasan areal pertambangan, reboisasi, penanaman baru dan extensifikasi lainnya dibidang pertanian.
4. Pembelian Ternak untuk dikembangkan/diternakan untuk diambil susunya, bulunya atau Telurnya.
5. Margin Perdagangan, Servisecharges dan biaya-biaya pengalihan pemilik dalam hal pembelian tanah, deposit bahan galian/tambang, areal hutan dan barang-barang sejenisnya.
6. Penyediaan mesin-mesin dan alat-alat perlengkapannya yang digunakan untuk suatu kegiatan ekonomi.
7. Semua kegiatan konstruksi dan perbaikan besar-besaran dari Konstruksi tersebut.

Apabila kita ingin menghitung pembentukan Modal setelah seperti dalam konsep maka hampir tidak mungkin pada saat sekarang ini, Terutama datanya yang kurang lengkap.

Maka untuk menghitung besarnya pembentukan Modal Bruto ini dilakukan pendekatan yang didasarkan dari Sumber data :

1. Laporan dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah)
2. Persentase dari Out Put Sektor Konstruksi.
3. Laporan dari Departemen Industri untuk melihat pembelian dari mesin untuk keperluan proses Industri (Terutama Industri Kecil).
4. Hasil Pengolahan Survei Industri Besar & Sedang, Penggalan untuk melihat Nilai pembentukan Modalnya.

Ekspor dan Impor

Ekspor dan Impor meliputi transaksi barang dan jasa antara masyarakat suatu region dengan masyarakat region lain. Transaksi tersebut meliputi ekspor dan Impor barang, Pengangkutan Komunikasi, Jasa-jasa Asuransi dan berbagai Jasa lainnya seperti Jasa Perdagangan yang diterima oleh pedagang region tersebut yang kegiatannya mengadakan Transaksi barang diluar region tersebut

Selain itu sebagai konsekwensi Konsep konsumsi, harus diperhitungkan besarnya Konsumsi yang dilakukan penduduk Jawa Barat diluar Jawa Barat yang diperlukan sebagai Impor dan sebaliknya besarnya konsumsi oleh bukan penduduk Jawa Barat di Wilayah Jawa Barat yang harus diperlukan sebagai ekspor.

Dari uraian diatas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa untuk Pengumpulan data Ekspor dan Impor sangat sulit diperoleh karena belum dilaksanakannya Survei-Survei yang menunjang data Ekspor Impor Jawa Barat seperti :

1. Survei Keluar masuk barang antar Provinsi dimana kita harus tahu selain kuantumnya juga nilai per jenis barang untuk dapat membedakan apakah barang Konsumsi atau barang Modal. Survei ini harus dilakukan pada titik perbatasan antara Provinsi misalnya pada Jembatan-Jembatan Timbang.
2. Survei pengeluaran Konsumsi para pengunjung ke Jawa Barat dan Konsumsi Penduduk Jawa Barat yang berkunjung ke Provinsi lain.

Oleh karena hal tersebut diatas, maka dalam PDRB menurut penggunaan Nilai Ekspor Netto merupakan residual yaitu.

Nilai PDRB dikurangi konsumsi rumah tangga. Konsumsi institusi Non profit, Konsumsi Pemerintahan dan Pembentukan Modal Bruto.

ULASAN PERKEMBANGAN EKONOMI PROVINSI JAWA BARAT BERDASARKAN
PENGGUNAAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 1979 - 1983.

Komposisi Penggunaan PDRB.

Salah satu program Pemerintah dalam menunjang perekonomian Region/Daerah adalah adanya pembatasan barang Impor dan Anjuran Pemerintah untuk memakai produksi Dalam Negeri. Dengan adanya hal tersebut diatas jelas akan meningkatkan demand bagi barang dalam Negeri yang akhirnya akan menimbulkan Produksi dalam Negeri (Domestik) akan meningkat. Peningkatan Produksi bagi suatu Region/Daerah menyebabkan pendapatan atau produk Domestik Regional Bruto akan meningkat. Besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan oleh suatu Region/Daerah akan digunakan untuk bermacam-macam kegiatan yang tentunya ditujukan untuk kesejahteraan Masyarakatnya.

Untuk mengetahui sampai sejauh mana penggunaan Produk Domestik Regional Bruto didalam meningkat/kesejahteraan masyarakat ataupun meningkatkan roda Perekonomian daerahnya, maka kita dapat menganalisa dari data kuantitatif hasil penghitungan Penggunaan Produk Domestik Regional Bruto tersebut.

Dari Tabel 1 kita dapat melihat besarnya Penggunaan PDRB oleh konsumsi rumahtangga & LSTMU, Konsumsi Pemerintah, Pembentukan modal dan ekspor Netto.

Penggunaan PDRB yang terbesar di Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun masih digunakan untuk konsumsi rumah tangga dan LSTMU yang pada tahun 1979 besarnya adalah Rp 2.348,06 Milyar dan tahun 1983 meningkat menjadi Rp 5.353,64 Milyar menurut Atas Dasar Berlaku. Sedangkan secara riil (Atas Dasar Harga Konstan '75) besarnya pada tahun 1979 Rp 1.404,09 Milyar dan pada tahun 1983 Rp 1.905,51 Milyar.

Bila kita hitung laju pertumbuhan konsumsi rumahtangga dan LSTMU selama periode 1979 - 1983 atau selama masa 5 tahun, terjadi pertambahan sebesar = 128,00 % Atas Dasar Harga Berlaku dan = 35,71 % Atas Dasar Harga Konstan '75.

Penyebab besarnya konsumsi rumah tangga & LSTMU ini adalah disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk. Menurut hasil Registrasi jumlah Penduduk Provinsi Jawa Barat tahun 1979 = 24.736.560 jiwa dan pada tahun 1983 = 27.625.072 jiwa atau terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar = 11,68 % selama periode 1979 - 1980.

Penggunaan PDRB pada Konsumsi Pemerintah dapat menggambarkan secara kuantitatif keikutsertaan Pemerintah didalam melaksanakan pembangunan daerahnya, hal ini karena Konsumsi pemerintah mencakup biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah dalam meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat.

Perlu diketahui bahwa konsumsi pemerintah mulai tahun 1981 termasuk konsumsi Hankam sedangkan pada tahun sebelumnya belum termasuk Konsumsi Hankam.

Pada tahun 1979 besarnya Konsumsi Pemerintah Rp 467,00 Milyar dan pada tahun 1980 sebesar Rp 631,67 milyar Atas Dasar Harga Berlaku.

Sedangkan Atas Dasar Harga konstan '75 besarnya Konsumsi Pemerintah Rp 279,25 dan pada tahun 1980 Rp 301,15 milyar.

Konsumsi Pemerintah Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 1981 sebesar Rp 1.149,72 milyar dan pada tahun 1983 sebesar = Rp 1.741,90 atau terjadi kenaikan selama periode 1981-1983 sebesar Rp 51,51 %.

Pada tahun 1981 besarnya Konsumsi Pemerintah Atas Dasar konstan '75 Rp 491,40 milyar dan pada tahun 1983 Rp 586,50 milyar atau terjadi Kenaikan selama periode 1981 - 1983 sebesar Rp 19,35 %.

Penggunaan PDRB pada investasi merupakan suatu yang sangat penting untuk dianalisa, karena dengan data kuantitatif yang tersedia dari tahun ke tahun dapat menggambarkan peranan pemerintah maupun swasta dalam menunjang perekonomian daerahnya.

Peningkatan perekonomian suatu region/daerah hanya dapat ditunjang dengan adanya investasi yang cukup memadai di daerahnya tersebut.

Besarnya penggunaan PDRB pada investasi Atas Dasar Harga Berlaku tahun 1979 = Rp 881,06 Milyar dan pada tahun 1983 = Rp 1.756,88 milyar atau terjadi kenaikan selama periode 1979 1983 sebesar 99,41 %.

Sedangkan Atas Dasar Harga Konstan '75 besarnya investasi tahun 1979 = Rp 498,90 milyar dan pada tahun 1983 Rp 636,49 milyar atau terjadi kenaikan sebesar 27,58 % selama periode tersebut.

Penggunaan PDRB pada Ekspor Netto merupakan gambaran tentang surplus tidaknya suatu daerah dengan daerah lain dalam hal transaksi perekonomian.

Besarnya ekspor netto Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 1979 Rp 307,49 milyar dan pada tahun 1983 Rp 333,88 milyar atau terjadi kenaikan selama periode 1979-1983 sebesar 8,59 %, Atas Dasar Harga Konstan '75 besarnya Ekspor Netto adalah - Rp 181,60 milyar tahun 1979 dan tahun 1983 sebesar Rp 136,72 milyar, atau terjadi penurunan sebesar -24,71 %.

Laju Pertumbuhan Penggunaan PDRB.

Besarnya laju pertumbuhan PDRB pada Konsumsi Rumah tangga dan LSTMU, Konsumsi Pemerintah, pembentukan Modal dan Ekspor Nett Netto sangat dipengaruhi keadaan perekonomian suatu daerah. Untuk memperbandingkan Laju Pertumbuhan ke empat bagian dari - penggunaan PDRB, lihat Tabel dibawah ini

TABEL A : Rata-Rata Laju Pertumbuhan
Penggunaan PDRB Provinsi Jawa Barat
Tahun 1979 - 1983.

U r a i a n	Atas Dasar Harga Berlaku (%)	Atas Dasar Harga Konstan (%)
(1)	(2)	(3)
1. Konsumsi R.T. & LSTMU	24,58	7,28
2. Konsumsi Pemerintah	29,06 *)	8,58 *)
3. Pembentukan Modal	28,06	8,25
4. Ekspor Netto	3,07	-8,51
P D R B	27,29 *)	6,74 *)

*) Tidak termasuk tahun 1981.

Dari Tabel diatas terlihat rata-rata Laju Pertumbuhan terbesar adalah pada Konsumsi Pemerintah Atas Dasar Harga Konstan '75 sebesar 8,58 % disusul oleh pembentukan Modal 8,25 % dan Konsumsi RT & LSTMU sebesar 7,28 %.

Besarnya rata-rata Laju Pertumbuhan pada konsumsi Pemerintah mungkin disebabkan oleh kegiatan dari Pemerintah dalam melaksanakan pembengunan baik pembangunan ekonomi maupun peningkatan pelayanan ke masyarakat.

Dari kegiatan tersenut jelaslah bahwa pemerintah memerlukan biaya-biaya yang cukup besar atau dengan perkataan lain Konsumsi Pemerintah akan terus bertambah.

Sedangkan besarnya rata-rata Laju Pertumbuhan investasi, mungkin disebabkan oleh peranan pengusaha swasta untuk meningkatkan perekonomian daerahnya.

Distribusi Penggunaan PDRB.

Distribusi persentase pada Penggunaan PDRB dapat memberikan Tingkat Kemajuan perekonomian suatu region/daerah.

Ada Anggapan bahwa untuk masyarakat yang perekonomiannya sudah maju, Penggunaan PDRB pada konsumsi Rumah Tangga Distribusi persentasenya akan terus menurun, sebaliknya pada investasi dan ekspor Nettonya akan terus menaik.

Pada Tabel : 6 terlihat besarnya Distribusi persentase pada konsumsi Rumah Tangga & LSTMU tahun 1979 = 59,38 % dan pada tahun 1983 = 58,36 % atau terjadi penurunan selama periode 1979 1983 sebesar = 1,72 %.

Distribusi persentase dari penggunaan PDRB Provinsi Jawa Barat yang terbesar masih digunakan untuk konsumsi Rumah Tangga & LSTMU. Sedangkan Distribusi persentase dari penggunaan PDRB yang terkecil adalah Ekspor Netto.

Besarnya Distribusi Ekspor Netto Atas Dasar Harga Konstan '75 tahun 1979 = 7,68 % dan pada tahun 1983 = 4,19 %.

Distribusi Ekspor Netto pada penggunaan PDRB baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Konstan '75 setiap tahun mengalami penurunan. Hal ini berarti perkembangan penggunaan PDRB untuk Ekspor Netto lebih kecil dibandingkan dengan perkembangan konsumsi Rumah Tangga, konsumsi Pemerintah maupun Investasi.

INDEK IMPLISIT.

Seperti analisa data yang lain Indeks Implisit Harga dari Penggunaan PDRB bisa menggambarkan tingkat Inflasi suatu daerah menurut Komponennya.

Besarnya inflasi selama 4 tahun dalam periode 1979 - 1983 adalah sebagai berikut .

- Konsumsi Rumah Tangga & LSTMU = 68,0 %
- Konsumsi Pemerintah = 78,0 %
- Pembentukan Modal = 56,3 %
- Ekspor Netto = 44,0 %

Inflasi yang terbesar selama periode tersebut terjadi pada komponen Konsumsi Rumah Tangga & LSTMU, ini berarti bahwa Harga Barang-barang dan kenaikan tarif Jasa untuk Konsumsi Rumah Tangga & LSTMU kenaikannya lebih besar dibandingkan dengan Harga barang pada komponen lainnya.

Sedangkan untuk komponen Ekspor Netto sebaliknya karena komponen ini mempunyai inflasi yang paling kecil selama periode 1979-1983 ini mempunyai inflasi yang paling kecil selama periode 1979- 1983 yaitu sebesar 44,0 %.

Tabel 1 : Penggunaan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Barat 1979 - 1983.

(Juta Rp)

Uraian	1979	1980	1981	1982	1983
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah tangga dan LSTMU	2.348.063,87	3.462.112,15	4.027.322,58	4.660.349,55	5.353.636,34
2. Konsumsi Pemerintah	467.002,27	631.668,54	1.149.716,48	1.270.833,23	1.741.902,46
3. Pembentukan Modal	881.055,91	1.231.745,54	1.375.895,00	1.475.253,41	1.756.885,24
4. Ekspor Netto	307.490,17	326.020,79	385.571,58	351.320,82	333.469,30
P D R B	4.003.612,22	5.651.547,02	6.938.505,64	7.757.757,01	9.185.893,34

CATATAN : *) Termasuk Hankam

Tabel 2 : Penggunaan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan '75 Provinsi Jawa Barat 1979 - 1983

(Juta Rp)

Uraian	1979	1980	1981	1982	1983
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah tangga dan LSTMU	1.404.091,55	1.564.198,79	1.632.748,57	1.799.903,13	1.905.511,56
2. Konsumsi Pemerintah	279.954,47	301.153,06	491.401,31	502.790,60	586.499,14
3. Pembentukan Modal	498.899,16	573.865,79	597.306,27	620.845,64	636.492,75
4. Ekspor Netto	181.602,98	194.717,11	212.262,58	185.585,52	136.718,88
P D R B	2.364.548,16	2.633.934,75	2.933.718,73	3.109.124,89	3.265.222,33

CATATAN : *) Termasuk Hankam

Tabel 3 : Laju Pertumbuhan Penggunaan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Barat 1979 - 1983

(Persentase)					
U r a i a n	1979	1980	1981	1982	1983
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga dan LSTMU	28,53	47,45	16,33	15,72	14,88
2. Konsumsi Pemerintah	33,38	35,26	82,01	10,53	37,07
3. Pembentukan Modal	61,60	39,80	11,70	7,22	19,09
4. Ekspor Netto	5,02	6,03	18,27	-8,88	-5,08
P D R B	32,79	41,16	22,77	11,81	18,41

Tabel 4 : Laju Pertumbuhan Penggunaan PDRB Atas Dasar Harga Konstan'75 Provinsi Jawa Barat 1979 - 1983.

(Persentase)					
U r a i a n	1979	1980	1981	1982	1983
(1)	(2)	(3)	(4)*	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah tangga dan LSTMU	4,51	11,40	4,39	10,24	5,87
2. Konsumsi Pemerintah	7,76	7,57	63,17	2,32	16,65
3. Pembentukan Modal	15,68	15,03	4,08	3,94	2,52
4. Ekspor Netto	-19,86	7,22	9,01	-12,57	-26,33
P D R B	4,57	11,39	11,38	5,98	5,02

Tabel 5 : Distribusi Persentase Penggunaan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Barat 1979 - 1983

(Persentase)					
U r a i a n	1979	1980	1981	1982	1983
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah tangga dan LSTMU	58,65	61,26	58,04	60,07	58,28
2. Konsumsi Pemerintah	11,66	11,18	16,57	16,38	18,96
3. Pembentukan Modal	22,01	21,79	19,83	19,02	19,13
4. Ekspor Netto	7,68	5,77	5,56	4,53	3,63
P D R B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 6 : Distribusi Persentase Penggunaan PDRB Atas Dasar Harga Konstan '75 Provinsi Jawa Barat 1979 - 1983

(Persentase)					
U r a i a n	1979	1980	1981	1982	1983
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah tangga dan LSTMU	59,38	59,39	55,65	57,89	58,36
2. Konsumsi Pemerintah	11,84	11,43	16,75	16,17	17,96
3. Pembentukan Modal	21,10	21,79	20,36	19,97	19,49
4. Ekspor Netto	7,68	7,39	7,24	5,47	4,19
P D R B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 7 : Indeks Implisit PDRB Provinsi Jawa Barat
1979 - 1983.

(Persentase)

U r a i a n	1979	1980	1981	1982	1983
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga dan LSTMU	167,23	221,33	246,66	258,92	280,96
2. Konsumsi Pemerintah	166,81	209,75	233,97	253,76	297,00
3. Pembentukan Modal	176,60	214,64	230,35	237,62	276,03
4. Ekspor Netto	169,32	167,43	181,65	189,30	243,91
P D R B	169,32	214,57	236,51	249,52	281,33

<https://jabar.bps.go.id>